

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini telah tercatat 150 juta ton plastik atau sampah di lautan dunia. Jumlah ini akan meningkat sebesar 250 juta lagi apabila tren urbanisasi, produksi, dan konsumsi masyarakat terus berlanjut. Sebuah laporan dari *World Economic Forum* dan *Ellen MacArthur Foundation* memperkirakan bahwa pada tahun 2050 akan ada lebih banyak sampah daripada ikan (berdasarkan berat), kecuali bila terdapat jalur-jalur paksa-guna yang lebih efektif untuk penggunaan sampah plastik; pengurangan kebocoran sampah ke sistem-sistem alami secara drastis, dan penghentian penggunaan plastik yang berbasis fosil. (Sampah Laut Indonesia, 2018 hlm. 1).

Wilayah Asia merupakan wilayah dengan pertumbuhan produksi sampah tercepat dan terbanyak di dunia. Penelitian yang telah diterbitkan menunjukkan bahwa di antara 192 negara di dunia yang telah dianalisa, lima negara di antaranya bertanggung jawab atas lebih dari 50% produksi keseluruhan sampah, semuanya berada di kawasan Asia yaitu China, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand (Jambeck et, 2015). Bila 75% kebocoran sampah di daratan pada lima negara tersebut dapat ditekan, hal ini akan mengurangi aliran sampah di darat menuju ke laut nantinya secara global sebesar 45% (McKinsey, 2015). Pemicu utama kebocoran sampah adalah sampah yang tidak terpungut dan rendahnya nilai beberapa jenis sampah plastik tertentu serta kurangnya sistem pengelolaan sampah, 75% sumber kebocoran sampah dari daratan berasal dari sampah yang tidak terpungut dan 25% dari sistem resmi pengelolaan sampah padat perkotaan (McKinsey, 2015).

Menghadapi problem di atas banyak negara-negara tidak terkecuali Indonesia rutin memperbincangkan solusi dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Telah banyak peraturan dan hukum dunia yang menganjurkan pada setiap negara untuk dapat mempertimbangkan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan pada setiap aspek pembangunan, agar terjaganya kelestarian bumi yang seutuhnya. Dewasa ini telah lahir sebuah kebijakan yang diantaranya

membahas dan memberikan solusi pada keberlanjutan dan perbaikan lingkungan. Gagasan yang diusung yaitu *sustainable development goals* atau SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan), SDGs merupakan (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs masa berlakunya 2015-2030; (b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan, dan pembahasan mengenai kelestarian lingkungan dan pengelolaannya. Pada tujuan ke-11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan dan ke-15 tentang menjaga ekosistem darat yang di dalamnya terkandung unsur pendidikan peduli terhadap lingkungan (Hoelman dkk, 2016 hlm 4).

Konsep agenda pembangunan berkelanjutan seperti tercantum dalam tujuan pembangunan *sustainable development goals* harus didukung dengan sebuah advokasi sosial yang bisa menyelaraskan antara program dengan praktik kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, artinya dimana seharusnya pemerintah lebih menekankan pada peran komunitas ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut serta mendampingi masyarakat terkait upaya sosialisasi gaya hidup ramah lingkungan. Maka terkait dalam pemahaman tentang pendidikan peduli lingkungan, sudah sejatinya untuk dapat digalakkan gerakan ekoliterasi terhadap respon isu persampahan (Sarmiasih, 2018). Pemahaman ekoliterasi merupakan tanggap atau respon kepada lingkungan dengan kemampuan atas kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup dengan segala isinya yang memang harus dimanfaatkan secara bijak (Hamzah, 2013).

Permasalahan sampah mutlak harus ditangani secara bersama. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan. Sebagai upaya menggugah kepedulian dalam penanganan permasalahan lingkungan khususnya sampah, serta untuk menciptakan kualitas lingkungan pemukiman yang bersih dan ramah lingkungan maka, harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan cara: (1) pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan pemilahan, atau pemrosesan dengan teknologi yang sederhana seperti *komposting* dengan skala rumah tangga atau skala lingkungan dan (2) peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di koordinir oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kelompok ini bertugas

mengkoordinir pengelolaan kebersihan lingkungan serta demi mencegah terjadinya penumpukan sampah, dibutuhkan suatu konsep berkelanjutan dan sistem pengelolaan sampah yang tepat. Salah satu konsep yang memenuhi kualifikasi tersebut adalah konsep *zero waste* (El Haggar 2007; Widiarti 2012, hlm 101).

Suatu konsep pengelolaan sampah yang berupaya menghindari dan menghilangkan sampah serta berupaya memulihkan lingkungan atau sumberdaya alam yang terkena dampak dari sampah merupakan dasar dari kegiatan *zero waste*. Konsep *zero waste* juga dijelaskan oleh Prajati dan Darwin (2017, hlm. 40) yang mengemukakan dalam artikelnya bahwa, “*zero waste* diartikan sebagai proses perancangan dan pengelolaan produk dan proses secara sistematis untuk menghindari dan menghilangkan limbah serta memulihkan sumberdaya alam yang terkena dampak limbah atau barang yang menimbulkan sampah plastik (*non organik*)”.

Dalam ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa, “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat”. Berdasarkan atas zat pembentuknya (biologis dan kimia) sampah dibedakan menjadi sampah *organik* (sampah basah) dan sampah *anorganik* (sampah kering). Sampah basah juga disebut sampah yang mudah membusuk (*garbage*) karena aktivitas *mikroorganisme*, seperti daun, batang dan ranting pohon, sisa sayur-mayur, buah-buahan, kayu bekas bangunan, dan bangkai binatang sedangkan sampah kering juga disebut sampah yang sulit membusuk (*refuse*) seperti kertas, plastik, potongan kain, logam, gelas, dan karet (Wardi 2011, hlm. 167).

Permasalahan sampah harus diatasi mulai dari faktor manusia atau masyarakat pada umumnya serta juga faktor yang meliputi aspek teknis-operasional, hukum, pendanaan, sosial, dan institusi atau manajemen. Pada umumnya pengelolaan sampah di Indonesia masih terbilang tradisional terkait kesadaran terhadap sampah yang akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan. Ketentuan yang berlaku bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah tersebut sampai pada proses akhir serta pada

fokus penanganan sampah, hal ini sebenarnya belum berjalan secara efektif sebagai contoh yang paling populer dari permasalahan tersebut antara lain adalah semakin sulitnya mencari lahan sebagai Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga mahalnya biaya transportasi pengangkutan sampah (UU No. 18, 2008; PP No.81, 2012; Wahyono 2001, hlm 276).

Kota Banda Aceh juga mengalami permasalahan yang sama terhadap sampah. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) berupaya mensosialisasikan sistem pengelolaan sampah, terutama kepada ibu-ibu rumah tangga. Tetapi secara umum masyarakat masih tergolong rutin membuang sampah sembarangan. Program-program pengurangan sampah *anorganik* juga tidak berjalan secara efektif, mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah yang tinggi, tetapi hal tersebut juga dikarenakan oleh pemerintah kota yang kesulitan mengangkut sampah karena minimnya armada dan kesulitan mengelola pekerja yang umumnya adalah tenaga lepas lalu juga diperparah oleh masalah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mulai menyempit, maka perlu adanya sinergisitas antara DLHK3 dengan Teknik Sipil dan FKIP Universitas Syiah Kuala sebagai calon pengajar agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman peduli lingkungan pada lembaga pendidikan nantinya. Permasalahan sampah saat ini menjadi aspek penting dan serius bagi pemerintah Kota Banda Aceh, bila aspek ini tidak diantisipasi secara tepat dan benar, maka kedepannya sampah akan menjadi permasalahan utama bagi pemerintah Aceh (aceh.tribunnews.com/2016/08/23).

Mengatasi dampak permasalahan sampah, pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menyusun dan menerbitkan peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem *Waste Collecting Point*, dengan menimbang bahwa dalam rangka pengendalian timbunan sampah, pemerintah memandang perlu melakukan pengelolaan sampah dengan pola pengurangan sampah dan pengolahan pada sumbernya. Pada bulan Juni 2017 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kegiatan sistem *waste collecting point* tersebut. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah di Kota

Banda Aceh. (Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017; HABA CoMU 2017, hlm 1; <http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2018/04/10/4>).

Berdasarkan perkembangan sistem *waste collecting point* yang telah dilaksanakan di beberapa desa, memberikan manfaat dapat mengurangi produksi sampah ke TPA (DLHK3, 2017), maka pemerintah Kota Banda Aceh khususnya DLHK3 memperluas cakupan kinerja pengelolaan sampah pada lembaga pendidikan yaitu sekolah, di mana sekolah juga merupakan penyuplai sampah serta disisi lain sebagai lembaga dengan pendidikan sehingga diharapkan nantinya dengan diperkenalkan sejak dini upaya sistem pengelolaan sampah maka dapat menciptakan suatu pendidikan karakter peduli terhadap lingkungan hidup dengan berlandaskan pada kurikulum sekolah yang berlaku.

Lingkungan sekolah juga tidak terlepas dari permasalahan sampah. Sekolah merupakan salah satu penyumbang sampah dengan jumlah yang cukup besar. Sampah sekolah umumnya merupakan buangan padat dan merupakan sampah *organik* yang cenderung menebarkan bau busuk bila tidak segera diatasi dengan tepat dan benar. Sampah kering yang dihasilkan berupa kertas hasil dari tulis menulis, plastik pembungkus jajanan, kemasan barang dan logam. Sedangkan sampah basah berasal dari dedaunan pohon, ranting, potongan rumput taman dan sisa makanan. Pengelolaan sampah sekolah menjadi salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjadikan sekolah lebih bersih dan nyaman. Sampah yang tidak terangkut dan menumpuk di sekolah dapat menimbulkan pencemaran yang akan merusak lingkungan sekolah dan proses pembelajaran (Manurung: 2008, hlm. 22-23).

Berdasarkan upaya menciptakan Kota Banda Aceh yang lebih bersih dengan menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada generasi muda khususnya peserta didik, dalam kesepakatan bersama antara DLHK3 dan SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh dalam pengelolaan sampah (MoU, 2019), memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pembelajaran di dalam maupun luar kelas pada peserta didik terkait pengelolaan dan pengolahan sampah, sehingga nantinya SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh juga menjadi sekolah percontohan di Kota Banda Aceh sebagai model sekolah peduli lingkungan dengan pengelolaan sampah.

Implementasi sistem *waste collecting point* di lingkungan sekolah masih tergolong baru sehingga terdapat kendala diantaranya adalah kurikulum yang diasumsikan belum optimal, baik secara konsep maupun praktik serta faktor-faktor lain yang menghambat keberhasilan sistem ini, diantaranya terbatasnya referensi, sarana prasarana pendukung yang kurang memadai, serta warga sekolah yang perlu beradaptasi. Kurikulum sebagai faktor penting pembawa arah pendidikan belum didasarkan pada konsep pengembangan secara tepat, kesesuaian dan konsistensi antar komponennya serta relevansinya dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga *outcome* yang dihasilkan belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan relevansi pada tinjauan awal penelitian ini. *Pertama*, keefektifan dari pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep-konsep tertentu sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekolah. *Kedua*, kurangnya pendidikan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan yang diberikan kepada generasi muda dalam upaya mengatasi permasalahan sampah karena belum adanya suatu pembelajaran atau sistem yang efektif dan bersinergisitas kepada siswa-siswi untuk berperan aktif dalam penanganan sampah di sekolah. Adapun penelitian ini, akan mengisi plot kajian yang belum tersentuh dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang bagaimana strategi implementasi sistem *waste collecting point* dalam upaya mengatasi permasalahan sampah sekolah dalam proses pembelajaran.

Tinjauan masalah-masalah di atas membuat kajian ini menjadi lebih menarik untuk diteliti karena beberapa alasan berikut: *Pertama*, minimnya kajian tentang sistem atau konsep pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. *Kedua*, kurangnya pendidikan tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekolah yang bersifat mentalitas kepada siswa. *Ketiga*, rendahnya sistem pengelolaan sampah yang efektif pada lingkungan sekolah. *Keempat*, upaya menumbuhkan nilai-nilai pendidikan kepedulian lingkungan, dan *Kelima*, tuntutan akan sebuah perubahan pada kepedulian lingkungan yang lebih baik khususnya pengelolaan sampah pada generasi pelajar.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, adapun subjek kasus dalam penelitian ini difokuskan di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh. Penentuan

subjek penelitian kasus didasarkan pada kesepakatan DLHK3 dan SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh sebagai *pilot project*. Pelaksanaan sistem *waste collecting point* berbasis sekolah yang masih tergolong baru sehingga menimbulkan minat untuk melakukan penelitian terhadap implementasi sistem *waste collecting point* dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di sekolah, dengan harapan dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam pengembangan sistem serta kurikulum yang lebih sesuai dan tepat dengan kondisi yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah dan realistik yang telah diuraikan di atas serta sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan sistem *waste collecting point* dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di sekolah melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem *Waste Collecting Point* Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana implementasi sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh?
4. Apa nilai pembelajaran dari implementasi sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengkaji apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.
4. Untuk mengkaji apa nilai pembelajaran dari implementasi sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah keilmuan geografi pada bidang kajian permasalahan lingkungan hidup. Ikut menyumbangkan gagasan-gagasan dan penemuan yang berkaitan dengan permasalahan sampah yang dikaji dalam implementasi sistem *waste collecting point* di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah, menjaga dan memelihara kebersihan serta lingkungan hidup sekitarnya masing-masing. Selain itu, penelitian implementasi sistem *waste collecting point* ini juga dapat meningkatkan keberlangsungan terhadap penanganan dan pengelolaan sampah.

b. Bagi Stakeholder

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan serta pedoman untuk dapat dievaluasi kembali bagi pemerintah Kota Banda Aceh khususnya serta pemerintah Aceh secara umum dalam menyusun sebuah kebijakan agar sistem *waste collecting point* dapat menjadi solusi terhadap permasalahan sampah di sekolah.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumber data, serta sebagai lanjutan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu pengelolaan sampah dan sistem *waste collecting point*.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis berisi mengenai alur dalam penulisan dari setiap bab sebagai pedoman penyusunan tesis. Adapun struktur organisasi dalam tesis ini terdiri dari:

1. BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta struktur organisasi.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan berbagai teori yang terkait dan pendukung landasan argumentasi penulis mengenai permasalahan yang diteliti, yakni implementasi pelaksanaan program dan upaya mengatasi permasalahan sampah serta pengelolaan sampah di Sekolah.
3. BAB III Prosedur penelitian, menjelaskan mengenai sejumlah cara yang berkaitan dengan kegiatan atau proses yang ditempuh oleh peneliti ketika melaksanakan penelitian. Sejumlah pembahasan yang dipaparkan pada bagian ini diantaranya, lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengolahan, pengumpulan data dan analisis data, definisi operasional, serta kerangka pemikiran penelitian.
4. BAB IV yaitu Temuan Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini penulis membahas temuan lapangan yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dilanjutkan oleh pembahasan hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori-teori dan konsep yang relevan.
5. BAB V yaitu Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Pada bagian ini penulis memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan hasil temuan.
6. Daftar Pustaka, berisi rujukan yang digunakan dalam menulis kajian mengenai “Implementasi sistem *waste collecting point* sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah sekolah” sumber tersebut diantaranya buku, jurnal dan sumber internet. Selain itu terdapat sumber lain berupa sumber lisan yang telah diwawancarai oleh penulis dalam membantu proses penelitian.